

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

damping Desa Kecamatan Cilamaya Wetan, Syukron. Menurutnya, sejak awal ia sudah memprediksi sengkatan anggaran JPS di Kabupaten Karawang.

Pasalnya, kata Syurkon, sejak awal penganggarannya saja, yang menggunakan istilah refocusing anggaran itu. Dianggap sudah bermasalah. Bahkan, hal itu pula, yang dulu sempat panas. Sampai memunculkan isu interplasi di DPRD Kabupaten Karawang.

Dari semua dinamika politis itu. Akhirnya, ribuan penerima JPS dari Pemkab Karawang yang menjadi korban. Terlebih saat ini, mereka terus digantung akan ketidakpastian distribusi bantuan tersebut. Yang sampai saat ini, baru satu kali cair dengan besaran Rp. 300 ribu per KPM.

"JPS ini kan perlu ada SK Bupati. Sejak awal saya sudah prediksi anggaran ini akan bermasalah. Buktinya sekarang terjadi. Disaat bansos dari sumber lain turun begitu deras. Tapi JPS Pemkab baru nonggol sekali, ini ada apa?," ungkap Syukron, di sela-sela distribusi Bansos di Kecamatan Cilamaya Wetan, Selasa, (25/8) kemarin.

Pantas saja, kata Syukron, JPS Pemkab ini disebut nanggung oleh pemerintah desa. Selain nominalnya yang sedikit dan hanya cair dua bulan. Regulasinya pun dianggap masih ngawang-awang. Jika dibandingkan dengan BLT Dana Desa saja, kata dia, darimulai payung hukum, tahapan pendistribusian, hingga penerima, semuanya sudah sangat jelas. Berbeda terbalik dengan JPS.

"Alhasil, penerima JPS ini yang tak cair-cair minta dimasukkan ke penerima BLT Dana Desa. Itu bisa saja dengan perbaikan musdesus. Tapi masalahnya, sudah sejauh mana kejelasan JPS Pemkab ini?," tanya Syukron.

"Apakah sudah terbit SK Bupati untuk pencairannya? Atau anggarannya sudah ready secara real? Kan yang terdampak dan menanti, kebanyakan adalah mereka yang baru menerima satu tahap kemarin," imbuhnya. Syukron mengaku pri-

hatin dengan kondisi ini. Di lapangan, ia mengaku kasihan melihat para KPM JPS Pemkab ini terus menanti dan bertanya-tanya pada pemerintah desa. Pasalnya, bansos dari pintu lain sudah cair berkali-kali. Sementara mereka baru satu kali. Itu pun nominalnya lebih kecil jika dibanding dengan bansos lain.

"Saya juga belum menerima gambaran sedikit pun, apakah bansos Pemkab ini bisa cair berlanjut atau tidak?," tandasnya.

Di sisi lain, salah satu warga yang terdata sebagai penerima JPS Kabupaten di Kecamatan Cilamaya Wetan, Muhammad Rohim mengaku iri ketika melihat tetangganya sudah mendapatkan bansos berkali-kali dari pemerintah.

Kata Rohim, hal itu membuat masyarakat lain yang belum menerima bansos tahap berikutnya, menjadi kecewa.

"Tetangga saya sudah 3 kali pak BLT Dana Desa itu. Terus lagi BST Pertanian kemarin Rp. 1,8 juta. Saya baru satu kali, itu juga cuma Rp. 300 ribu. Di mana keadilan ini pemerintah?," ketusnya kesal.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Abdul Azis sempat menuturkan. Jika distribusi jaring pengaman sosial (JPS) tahap ke-2, akan dibagikan bulan Agustus 2020 ini.

Lambannya proses pencairan JPS dari dana refocusing anggaran APBD itu menuai polemik di lapangan. Jika sebelumnya kepala desa diberondong pertanyaan oleh warga penerima manfaat. Saat ini, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pun, tak luput dari teror masyarakat.

"Saat Bansos dari pintu lain sudah tiga bahkan empat kali di bagikan. JPS dari kabupaten justru baru satu kali. Jelas kalau penerima JPS kabupaten iri," ungkap Ketua TKSK Cilamaya Wetan, Iwan Badarudin, kepada KBE, Minggu, (23/8) kemarin.

Disinggung soal dampak dari lambatnya pendistribusian bansos tersebut, Iwan mengaku, tak sedikit warga yang mendatangi rumahnya untuk menanyakan

kapan JPS kabupaten akan dicairkan.

Tak hanya datang ke rumah, kata Iwan, tak sedikit warga yang bertanya via telpon dan pesan WhatsApp untuk menanyakan hal serupa.

"Bansos kabupaten itu cuma Rp. 300 ribu untuk dua bulan. Kenapa lambat? BST Pertanian saja sudah mau 4 kali. Nominalnya Rp. 600 ribu," singgungnya.

Ia berharap, Pemkab Karawang, melalui Dinas Sosial bisa bergerak cepat untuk mendistribusikan bantuan tersebut. Pasalnya, saat ini, warga penerima manfaat sedang menanti, karena membutuhkan bantuan sosial itu.

"Harapannya tolong dipercepat lagi, kalau ada kendala sosialisasikan. Kasihan warga menanti-nanti bantuan itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Forum TKSK Kabupaten Karawang, Leo Fitriana menuturkan, sejumlah bantuan sosial dari berbagai pintu sudah di salurkan masing-masing lebih dari 2 tahap. Mulai dari BST Kemensos, BLT Dana Desa, hingga pendistribusian BPNT perluasan.

Namun, kata Loe, Bansos Kabupaten yang nominalnya hanya Rp. 300 ribu per bulan per KPM itu, belum jelas realisasinya di tahap 2 ini. Padahal, katanya, 50 ribuan lebih penerima manfaat bantuan tersebut sudah menanti.

"Untuk Bansos Tunai Pemkab masih belum semua didistribusikan. (Alasannya, red) silahkan tanya ke pihak berwenang," ucapnya, pekan lalu.

Sementara, saat di konfirmasi, Kepala Dinas Sosial Karawang, Abdul Aziz mengakui, jika lambatnya penyaluran bansos kabupaten itu lantaran terjadi kendala administrasi yang saat ini sedang ia tempuh.

"Iya (ada kendala, red). Karena bantuan ini menggunakan dana BTT (Belanja Tak Terduga, red) jadi ada proses tambahan," tulis Aziz dalam pesan singkatnya, dengan emotikon "Maaf".

"Karena ini pengalaman pertama bagi saya menggunakan dana BTT, jadi tidak saya perhitungkan. Besok akan kami bahas kembali," imbuhnya. (wyd/mhs)